

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis. Pendapat lain menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Strategi ini dapat menyertakan bukti kuantitatif yang bersandar pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya dari proposisi teoretis.

Studi kasus dapat menggunakan bukti baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian dengan subjek tunggal memberikan kerangka kerja statistik untuk membuat inferensi dari data studi kasus kuantitatif. Seperti halnya pada tujuan penelitian lain pada umumnya, pada dasarnya peneliti yang menggunakan metoda penelitian studi kasus bertujuan untuk memahami obyek yang ditelitinya. Meskipun demikian, berbeda dengan penelitian yang lain, penelitian studi kasus bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami obyek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu 'kasus'. Berkaitan dengan hal tersebut, Yin (2009) menyatakan bahwa tujuan penggunaan penelitian studi kasus adalah tidak sekedar untuk menjelaskan seperti apa obyek yang diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi. Dengan kata lain, penelitian studi kasus bukan sekedar menjawab

pertanyaan penelitian tentang ‘apa’ (what) obyek yang diteliti, tetapi lebih menyeluruh dan komprehensif lagi adalah tentang ‘bagaimana’ (how) dan ‘mengapa’ (why) objek tersebut terjadi dan terbentuk sebagai dan dapat dipandang sebagai suatu kasus. Sementara itu, strategi atau metoda penelitian lain cenderung menjawab pertanyaan siapa (who), apa (what), dimana (where), berapa (how many) dan seberapa besar (how much).

3.2. Peubah dan Pengukuran

Peubah dan pengukuran dalam penelitian ini adalah Komponen SPI :

3.2.1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat, dalam penelitian ini yaitu pada BPKAD Kota Malang

3.2.2. Penilaian risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Unsur ini memberikan penekanan bahwa pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis resiko. Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Sedangkan analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam rangka



penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, sehingga untuk mencapainya pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen yang terintegrasi dengan rencana penilaian risiko.

3.2.3. Aktivitas Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah, seperti:

- 12) Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- 13) Pembinaan sumber daya manusia/Pegawai Pemerintahan;
- 14) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- 15) Pengendalian fisik atas aset;
- 16) Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- 17) Pemisahan fungsi;
- 18) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- 19) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- 20) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- 21) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- 22) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Selain itu, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko dan disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah.



Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan tersebut, sehingga untuk menjamin kegiatan pengendalian masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan maka harus dievaluasi secara teratur.

3.2.4. Informasi dan komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Dalam hal ini pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Berkaitan dengan pengkomunikasian informasi, wajib diselenggarakan secara efektif, dengan cara sebagai berikut:

- 3) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
- 4) Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

3.2.5. Pemantauan

Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Unsur ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Pimpinan instansi harus menaruh perhatian serius terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian intern dan perkembangan misi organisasi. Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung memberikan



pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, agar kegiatan pemantauan menjadi lebih efektif, seluruh pegawai perlu mengerti misi organisasi, tujuan, tingkat toleransi risiko dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam menerapkan unsur SPIP, setiap pimpinan Instansi Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan Instansi Pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern ini mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Sedangkan Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada setiap instansi Pemerintahan.

3.3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survey) atau penelitian benda (metode observasi)



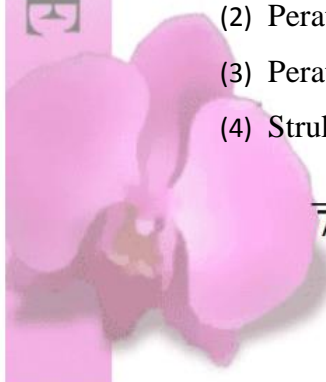
3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang dilakukan yaitu:

- 3.4.1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Pengamatat disebut *observer* yang diamati disebut *observe*.
- 3.4.2. Quisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara membagikan quisioner kepada responden yang bersangkutan secara langsung dan kemudian Menggasilkan Tabulasi untuk melihat hasil dominannya. (saya mengambil rujukan quisioner dari EVALUASI PEMENUHAN UNSUR/SUB UNSUR/KRITERIA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SKPD KONDISI TAHUN 201X SAMPAI DENGAN BULAN TAHUN 201X)
- 3.4.3. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya-jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview* guide (panduan wawancara). Ada beberapa orang yang diwawanvarai dalam penelitian ini, yaitu:
 - a. Salah satu staf unit akuntansi di BPKAD. Staf unit akuntansi di BPKAD diwawancarai karena BPKAD merupakan SKPD yang membuat laporan keuangan Pemda secara keseluruhan dengan cara mengumpulkan setiap laporan dari setiap SKPD.
 - b. Salah satu staf di Inspektorat. Staf Inspektorat diwawancarai karena Inspektorat merupakan SKPD yang bertugas mereview Laporan Keuangan Pemda sebelum ditandatangani oleh Walikota.

Adapun daftar pertanyaan yang diberikan adalah:

 - (1) Peraturan yang mendasari dilaksanakan SPI, baik itu Peraturan Pemerintah, Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Bupati.
 - (2) Peraturan yang mendasari struktur organisasi di SKPD Kabupaten Bungo.
 - (3) Peraturan yang mendasari pelaksanaan kegiatan SKPD.
 - (4) Struktur Pemerintah Kabupaten Bungo dan uraian tugas.



- (5) Profil Kabupaten Bungo termasuk visi, misi, tujuan dan prioritas pembangunan.
- (6) Pelaksanaan SKPD sebagai entitas akuntansi. Uraian opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo oleh BPK.

3.4.4. Dokumentasi adalah sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

3.5. Metode Analisis

Metode deskriptif kualitatif adalah pengungkap fakta, keadaan, fenomena, peubah dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyajikan data atau hasil yang apa adanya. Dengan kata lain skripsi ini melihat dari efektifitas SPI

3.5.1. Pemenuhan Komponen SPIP

- a. Lingkungan pengendalian
 - penegakan integritas dan nilai etika
 - komitmen terhadap kompetensi
 - kepemimpinan yang kondusif
 - pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan
 - pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
 - penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang sumber daya manusia
 - peran APIP yang efektif
 - hubungan kerja yang baik dengan SKPD terkait
- b. Penilaian Resiko
 - Identifikasi resiko
 - Analisis resiko
- c. Aktivitas Pengendalian
 - reviu atas kinerja SKPD yang bersangkutan
 - Pembinaan sumber daya manusia



- pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
 - pengendalian fisik dan aset
 - penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kerja
 - pemisahan fungsi
 - otoritas atas transaksi dan kejadian yang penting
 - pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
 - pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting
- d. Informasi dan Komunikasi
 - informasi pengendalian
 - komunikasi yang efektif
 - e. Pemantauan
 - pemantauan berkelanjutan
 - evaluasi terpisah

3.5.2. Pencapaian Tujuan SPIP

- a. Kegiatan yang efektif dan efisiensi
- b. Penyediaan informasi yang akurat dan reliabel
- c. Reliabilitas/keandalan pelaporan keuangan
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

3.6. Struktur Organisasi

